

Pemaknaan Aset Pemerintah Daerah (Sebuah Studi Fenomenologi),

by Oktavianus Pasoloran

Submission date: 19-Oct-2023 11:53PM (UTC-0700)

Submission ID: 2201614696

File name: Pemaknaan_Aset_Pemerintah_Daerah_Sebuah_Studi_Fenomenologi.pdf (9.34M)

Word count: 7606

Character count: 55805



ISBN : 978-602-52339-0-6 (PRINT)

ISBN : 978-602-52339-1-3 (ONLINE)

SEMINAR NASIONAL 2018

"MENGHADAPI TANTANGAN PERGURUAN TINGGI DI ABAD 21 DENGAN *WHOLE PERSON EDUCATION*"

PROSIDING

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR, 4 JULI 2018

IN COLLABORATION WITH :



surel: semnas@ukipaulus.ac.id

website: www.semnas.ukipaulus.ac.id



Prosiding
SEMINAR NASIONAL 2018
“Menghadapi Tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*”

Rabu, 4 Juli 2018
Di Hotel Best Western Plus Makassar Beach

Diterbitkan oleh:
Universitas Kristen Indonesia Paulus

In Collaboration with:



Surel: semnas@ukipaulus.ac.id
Website: www.semnas.ukipaulus.ac.id

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang setiap saat untuk mengantisipasi setiap perubahan yang bergerak dengan cepat. Oleh karena itu dalam rangka mengeksplorasi ilmu pengetahuan antara lain dalam bidang Teknik, Ekonomi, dan Hukum/Humaniora, maka Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (UKI Paulus) bekerjasama dengan Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (BKPTKI) menyelenggarakan Seminar Nasional 2018 dengan tema “Menghadapi tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*” yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018. Seminar Nasional ini merupakan rangkaian acara rapat tahunan BKPTKI yang bertujuan untuk menjadi media komunikasi ilmiah dalam memaparkan telaah hibriditas ilmu melalui hasil penelitian.

Buku yang disediakan oleh Panitia berisi kumpulan makalah ilmiah yang dipresentasikan oleh pemakalah seminar pada diskusi paralel. Kami berharap buku ini dapat membantu Bapak/Ibu/Saudara dalam memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai perspetif keilmuan.

Terima kasih

Makassar 4 Juli 2018

Salam,

Dr. Ir. Josefina Ernestine Latupeirissa, M.T.
Rektor UKI Paulus

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL 2018
“Menghadapi Tantangan Perguruan Tinggi di Abad 21 dengan *Whole Person Education*”
Universitas Kristen Indonesia Paulus

Susunan Dewan Redaksi

Penanggung Jawab:
Josefine Ernestine Latupeirissa

Ketua:
Natalia Paranoan

Sekretaris:
Atus Buku

Tim Reviewer:
Pasolang Pasapan
Jonie Tanijaya
Junus Mara
Petrus Peleng Roreng
Natalia Paranoan
Petrus Ma'na
Yoel Pasae
Atus Buku
Corvis L. Rantererung

Mitra Bestari:
Rudy Soenoko. Universitas Brawijaya Malang
Felix Pasila. Universitas Kristen Petra Surabaya
Trias Rahardianto. Politeknik Negeri Malang
Hedy Desire Rumambi. Politeknik Negeri Manado
Chalarce Totanan. Universitas Tadulako Palu

Dewan Editor:
Gerard Antonini Duma
Doddy Suanggana
Titus Tandiseno
Mira Labi Bandhaso

ISBN: 978-602-52339-0-6 (PRINT), 978-602-52339-1-3 (ONLINE)
Cetakan Pertama: Pertama, Juli 2018

Penerbit:
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Daya Makassar 90243
Telpon/fax (0411) 582825
Email: ukip@ukipaulus.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TIM REVIEWER	ii
DAFTAR ISI	iii
 ARTIKEL	
HUKUM/HUMANIORA	
1. Paradigma Pembelajaran Heutagogi dan Semangat <i>Cura Personalis</i> Untuk Menghadapi Tantangan Pendidikan Tinggi Di Abad 21. <i>Stefanus Soejanto Sandjaja</i>	1-7
2. Makna Kerja Dosen PTS Kristen Di Indonesia Sebagai Panggilan Hidup dari Tuhan. <i>Yusak Novanto</i>	8-16
3. Penggunaan Media Dan Saluran Komunikasi Petugas Lapangan KB (PLKB) Dalam Kampanye Partisipasi Pria Ber-KB Di Kota Palu. <i>Dyah Fitria Kartika Sari, Raisa Alatas</i>	17-24
 EKONOMI	
4. Efek Moderasi Risiko Sistematis Pada Pengaruh Pengembalian Aktiva, Derajat Total Leverage, dan Pertumbuhan Aktiva Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Terbuka Sektor Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015. <i>Deni Iskandar, Rudolf Lumbantobing</i>	25-33
5. Menyingkap Perilaku Pembelian Impulsif Produk Handphone Dengan Pertimbangan Harga Dan Promosi Produk Di Kalangan Mahasiswa Makassar. <i>Kordiana Sambara, Benyamin Mongan, Natalia Paranoan</i>	34-41
6. Implementasi <i>Good University Governance</i> pada Universitas Swasta Di Makassar. <i>Sita Yubelina Sabandar, Amiruddin Tawe, Chalid Imran Musa</i>	42-50
7. Pengujian Model Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Tana Toraja, Sulawesi Selatan). <i>Fransiskus Randa, Oktavianus Pasoloran</i>	51-65
8. Pendekatan Strategi Pemasaran Melalui <i>E-Commerce</i> Sebagai Keunggulan Bersaing Pada Cafe Sushi Box Di Kota Palu. <i>Aco Lele, Suryadi Samudra, Mohammad Zeylo Auriza</i>	65-75
9. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Pelaku UKM di Kota Makassar. <i>Daniella Cynthia. Sampepajung, Sita Yubelina Sabandar</i>	76-84
10. Pengaruh Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi empiris pada DPRD Kota Makassar). <i>Petrus P. Roreng, Afian Dezi Sanda Sipi</i>	85-91
11. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi (Studi pada Perusahaan Pengakuisisi yang Terdaftar di BEI Periode 2012-	

- 2016). *Frischa Faradilla Arwinda Mongan, Bertha Beloan*.....92-100
12. Analisis Efektivitas Promosi Penjualan *Point of Purchase Displays* dan Hadiah Langsung terhadap Volume Penjualan PT. Coca-Cola Matil Indonesia – Sales Center Makassar. *Daniela Cynthia Sampepajung, Ferdinand Poli*.....101-111
13. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *Surayya, Sukirman*.....112-121
14. Peranan Geographic Information System (GIS) dalam Penentuan Jadwal Tanam Kedelai (*Glycine Max*) Di Sulawesi Selatan. *Hendrik Gunadi, Kaimuddin, Dwi Yoga Primartono*.....122-129
15. Pemaknaan Aset Pemerintah Daerah (Sebuah Studi Fenomenologi). *Yohanis Lotong Ta'dung, Oktavianus Pasoloran, Fransiskus Randa*.....130-144
16. Evaluasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi: Studi Pada Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar. *Maria Yessica Halik, Markus Halik*.....145-152
17. Pengaruh Independensi Auditor dan Pemahaman *Good Governance* terhadap Kinerja Auditor Internal. *Maiercherinra Daud, Erna Pasanda, Yohanis Tasik Allo*.....153-159
18. Mengungkap Motif Di Balik Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pada PT Xyz Di Makassar. *Bertha Beloan, Natalia Paranoan*.....160-167
19. Dana Desa/Lembang: Paradoks dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Westerini Lusdani, Oktavianus Pasoloran, Fransiskus Randa*.....168-186
20. Analisis *Flypaper Effect* Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan). *Carolus Askikarno P.*.....187-195
21. Pengaruh Leverage, Investasi, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Rokok Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Erna Pasanda, Maierchenrinra Daud, Frischa Faradilla Arwinda Mongan*.....196-200
22. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Pemekaran Pada Kabupaten Toraja Utara Dan Kabupaten Tana Toraja . *Yohanis Tasik Allo,, Mira Labi Bandhaso*.....201-211
23. Menyingkap Perilaku Profesionalisme Auditor Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Natalia Paranoan, Christina Jeane Tandirerung, Edmondus Sadesto Tandungan*.....212
24. Mengungkap Manajemen Pengetahuan Berbasis Teknologi Informasi. *Senibudy, Anthon Paranoan, Dian Armayanti*.....213-226
25. Implikasi "Strategi *Public Relations*" Dalam Membentuk Persepsi, Sikap, dan Preferensi Wisatawan di Sulawesi Selatan". *Amir Jaya, Sitti Haerani*.....227-243
26. Pengaruh *Green Governance* Untuk Menekan *Enviromental Cost* Dan Menunjang *Economic Benefit* Kota Makassar. *Wendy Kala Tikupadang, Petrus Ma'na*.....244-249
27. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Peternakan dan Pertanian Sebagai Sektor Unggulan dalam Mendukung Nawacita Program Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu, NTT. *Chaterina A. Paulus, Marthen R. Pellokila, Yohanis Umbu L. Sobang dan Emil Azmanajaya*.....250-260

28. Pengembangan Produk – Produk Koperasi Simpan Pinjam Yang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Propensi Sulawesi Selatan). *Djusniati Rasinan, Jerlyen Paramita London*.....261-267
29. Analisis Tata Kelolah Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Petrus Peleng Roreng, Adiel Kemal Pratama*.....268-275
30. Pengaruh Sistem Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Makassar). *Wa Ode Rayyani Asriani Hasan*.....276

TEKNIK

31. Penerapan Teknologi Pembangkit Tenaga Mikro Hidro Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Yulianus Songli, Kristina Pasau*.....277-280
32. Pengujian Prototype Pembangkit Hibrid Tenaga Surya-Genset/PLTD sebagai Upaya Hemat Energi Listrik. *Matius Sau, Hestikah Eirene Patoding, Agustina Kasa*.....281-289
33. Indonesia Memiliki Potensi Panas Bumi (Geothermal) Terbesar Di Dunia. *Yusuf Siahaya, Agustina Kasa, Trisbenheiser*.....290-298
34. Optimalisasi Lokasi Pembangkit Listrik Dengan Pendekatan Sekuriti. *Hestikah Eirene Patoding, Matius Sau, Rombe*.....299-306
35. Studi Potensi Pemanfaatan Turbin Cross Flow Multi Nossel Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Daerah Terpencil. *Corvis L. Rantererung, Titus Tandiseno, Mika Mallisa*.....307-311
36. Pengering Kopi Dengan Energi Hibrid. *Kristina Pasau, Mika Mallisa*.....312-316
37. Metabolit Sekunder Ekstrak n-Heksana Spons *Callyspongia Aerizusa* Di Kepulauan Spermonde. *Lydia Melawaty, Akbar Tahir*.....317-320
38. Desain Alat Pengering Ikan Ramah Lingkungan. *Yulianus Songli, Kristina Pasau*.....321-324
39. Identifikasi Resiko K3 Preservasi Rekonstruksi Jalan Santan – Bontang Provinsi Kalimantan Timur. *Gebion Lysje Pagoray*.....325-338
40. Pemodelan Dan Rancang Bangun Pembangkit Hibrid Energi Bayu Dengan Energi Surya. *Eodia Tasik Sedan Lobo, Rombe*.....339-347
41. *E-Commerce* sebagai Strategi dalam Meningkatkan Penjualan Hasil Perkebunan *Wendyanto Panggalo, Hermin Arrang*.....348-355
42. Pengolahan Kulit Telur Menjadi Kalsium Oksida (CaO) Untuk Mendukung Ketersediaan Katalis Pada Industri Biodiesel. *Yoel Pasae, Ernawati, Eda Lolo Allo*.....356-362
43. Kajian Pemanfaatan Dan Distribusi Gas Alam Cair (Liquefaction Natural Gas - Lng) Di Indonesia. *Yusuf Siahaya, Gerard Antonini Duma, Kristiana Pasau*.....363-370
44. Produktifitas Tenaga Kerja Pada Pembangunan Tanggul Kanal Sinrijala Kota Makassar. *Josefine Ernestine Latupeirissa, Helen Adry Irene Sopacua, Anno Mario, Aleksius Masseleng*.....371-381
45. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perencanaan dan kajian Teknis Sistem Pendistribusian Air Bersih Di Desa Piongan. *Atus Buku, Josefine Ernestine Latupeirissa, Herby Calvin Pascal Tiyow*.....382-391
46. Teknologi Bioreaktor Menghasilkan Bahan Bakar di Pedesaan. *Mika Malissa, Corvis L. Rantererung*.....392-396

47. Rancang Bangun Mesin Penggiling Biji Kopi Untuk Peningkatan Produksi Kopi Bubuk. *Musa Bondaris Palungan, Charnia Iradat Rapa, Salma Salu*.....397-405
48. Pengaruh Suhu Penyangraian Terhadap Perubahan Warna Dan Kadar Air Biji Kopi Arabika. *Musa Bondaris Palungan, Agustina Yenny Biring*.....406-410
49. Pengaruh Temperatur Sangrai terhadap Cita Rasa Kopi Toraja Jenis Robusta. *Rosalia Sira Sarungallo, Selvian Lempang, Tjodi Harlim*.....411-416
50. Kajian Laboratorium Pemanfaatan material Asal Tondon Marante sebagai Agregat Kasar dalam Campuran Aspal panas Tipe *Hot Rolled Sheed Base*. *Ermitha Ambun RD., Jacob Bokko, Harni Eirene, Kornelius T. Tumbo*.....417-426
51. Pengaruh Pemanfaatan Abu Bonggol Jagung sebagai Bahan Tambah terhadap Kuat Tekan Beton. *Reni Oktaviani Tarru, Bastian Ampangallo, Israel Padang, Kalep Paita*.....427-435
52. Prospek Pengembangan Kincir Air Undershot di Indonesia. *Irwan Lie Keng Wong, Atus Buku, Josefina Ernestine Latupeirissa, Herby Calvin Pascal Tiyow*.....436-444
53. Kajian Model Pendistribusian Air Bersih Dengan Metode Grafitasi Di Desa Piongan. *Herby Calvin Pascal, Atus Buku*.....445-450

**Pemaknaan Aset Pemerintah Daerah
(Sebuah Studi Fenomenologi)**

Yohanis Lotong Ta'dung¹, Oktavianus Pasoloran², Fransiskus Randa³

tatoranda@yahoo.com

Universitas Atma Jaya, Makassar^{1,2,3}

ABSTRACT

A study to discover the meaning of assets understood by local financial managers and find the meaning of asset accounting for local financial managers has been conducted in Mamasa district. The interpretive paradigm with the phenomenology approach is used to analyze the in-depth interview data on the executive and the legislative constituents. The asset perspective is based on the funding source, management authority, and the function and usefulness of the asset. The results show that assets in the perspective of funding sources are interpreted as capital expenditures used in local government operations, political tools and sources of budget misuse. Based on the perspective of management authority, the asset is interpreted as the power of the regional financial manager and symbolic/prestige capital for the officials. Furthermore, in the perspective of function and usefulness, assets are interpreted as the welfare of the individual, the welfare of the organization, and the welfare of society (collective). The results of this study then become the basis for local governments related to transparency and accountability in managing local government assets. The contribution of research results is expected in the development of knowledge about the theory of asset accounting as well as a reference for further researchers in assessing local government assets.

Keywords: *accounting asset, local government asset, interpretive, phenomenology*

ABSTRAK

Penelitian untuk mengungkap makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah dan menemukan makna akuntansi aset bagi pengelola keuangan daerah telah dilaksanakan di kabupaten Mamasa. Paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara mendalam terhadap pihak eksekutif dan legislatif. Perspektif aset didasarkan pada sumber pendanaan, kewenangan pengelolaan, serta fungsi dan kegunaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset dalam perspektif sumber pendanaan dimaknai sebagai belanja modal yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah, alat politik dan sumber penyelewengan anggaran. Berdasarkan perspektif kewenangan pengelolaan, aset dimaknai sebagai kekuasaan dari pengelola keuangan daerah dan modal simbolik/prestise bagi pejabat. Selanjutnya dalam perspektif fungsi dan kegunaan, aset dimaknai sebagai kesejahteraan kesejahteraan individu, kesejahteraan organisasi, dan kesejahteraan masyarakat (kolektif). Hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah terkait transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset pemerintah daerah. Kontribusi hasil penelitian diharapkan dalam pengembangan pengetahuan tentang teori akuntansi aset serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji aset pemerintah daerah.

Kata kunci: *akuntansi aset, aset pemerintah daerah, fenomenologi, interpretif.*

PENDAHULUAN

Akuntansi selama ini dipahami sebagai seperangkat prosedur rasional yang dijalin untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan pengendalian yang rasional (Watts dan Zimmereman, 1986; Horngren dan Foster, 1991). Pemahaman seperti ini menyebabkan akuntansi diibaratkan seperti teknologi yang keras, kongkret, kasat mata dan bebas dari nilai-nilai suatu masyarakat yang menyusun dan mempraktikkannya. Namun dalam perkembangannya akuntansi telah dipahami dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam konteks organisasi dan sosial (Triuwono, 2000:2). Dengan demikian akuntansi mulai dipandang sebagai suatu entitas yang terus berubah, tidak dipandang sebagai suatu entitas yang statis dan sudah selesai, melainkan sebagai suatu yang mengalami perubahan terus-menerus tergantung lingkungannya (Hopwood, 1987, 1990; Morgan, 1988; Miller dan Napier, 1993).

Fungsi akuntansi adalah sebagai sumber informasi berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan (aset) hutang dan modal. Selain itu Akuntansi juga merupakan alat komunikasi dan alat pengukuran. Pengukuran dalam Akuntansi berkaitan erat dengan atribut (nilai). Nilai berupa angka-angka yang terpampang dalam laporan keuangan akan memberi manfaat, bila didasari praktik-praktik akuntansi yang sehat. Pemilihan konsep tertentu yang relevan harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Praktik yang sehat akan meliputi nilai-nilai berupa kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan adanya kepedulian terhadap pihak lain (Belkaoui, 2006:54).

Organisasi sektor publik telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektifitas. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen tradisional sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan manajemen sektor publik tersebut kemudian dikenal dengan istilah *New Public Management (NPM)*. NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan perusahaan publik (Mardiasmo, 2002).

Reformasi akuntansi pada sektor publik dengan pengenalan akuntansi akrual . Sistem akuntansi akrual telah diperkenalkan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga sektor publik di Indonesia agar lebih efektif dan efisien dalam penyediaan layanan kepada masyarakat (Nasution, 2008). IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Sistem pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan sistem pengelolaan dan standar akuntansi yang baru memberikan harapan akan terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Audit BPK tahun 2016, BPK memeriksa 533 (98%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2015. Sedangkan 9 pemda lainnya terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD. Masalah utamanya adalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut di atas, mengindikasikan bahwa perhatian terhadap aset pemerintah daerah menjadi penting dalam upaya perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Audit terhadap LKPD kabupaten

Mamasa tahun 2012 dan 2013 mendapat opini disclamer, ditahun 2014 mendapat opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Lemahnya kualitas **pengelolaan keuangan daerah** juga tercermin dari masih maraknya tingkat penyalahgunaan keuangan daerah (korupsi). . Pengelolaan aset yang baik akan sangat mendukung proses pemberian layanan kepada masyarakat (Jolicoeur dan Barret, 2004).

Konsep aset juga telah mengalami perkembangan. Selain aset berwujud, telah dikembangkan konsep tentang aset tidak berwujud pada sektor publik. Aset tidak berwujud tersebut berupa aset sumber daya manusia, dalam hal ini berupa pengetahuan dan kompetensi.. aset pengetahuan memainkan peranan yang sangat strategis dalam suatu organisasi dan perlu dilakukan pengukuran dan pengungkapan. aset juga telah berkembang pada ranah budaya. Akuntansi (termasuk akuntansi aset) yang merupakan hasil daya cipta manusia, tercipta sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat, dipercayai tercipta melalui proses interaksi sosial (Hines, 1989).

Nilai-nilai yang melekat pada diri aktor (akuntan) juga dapat memengaruhi bagaimana mereka memaknai setiap istilah atau simbol (tanda) yang ada dalam laporan keuangan termasuk aset itu sendiri. praktik akuntansi aset senantiasa berkembang sesuai dengan lingkungan di mana ia dipraktikkan dan dapat dimaknai berbeda oleh aktor yang berbeda. Oleh karena itu, studi tentang pemaknaan akuntansi aset pada pemerintah daerah menjadi lebih menarik dan memotivasi peneliti untuk memilih topik ini. Studi ini akan mengkaji lebih dalam tentang akuntansi aset yang dipahami dan dipraktikkan oleh aparatur pengelola keuangan daerah khususnya di Pemerintah kabupaten Mamasa.

Fokus penelitian dalam studi ini adalah bagaimana makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah dan bagaimana makna akuntansi aset bagi pengelola keuangan daerah. **Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk** mendeskripsikan makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah dan menemukan makna akuntansi aset bagi pengelola keuangan daerah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) pada sektor publik dan menjadi tambahan literatur mengenai perilaku pemerintah daerah terhadap pengembangan praktik akuntansi keuangan daerah khususnya akuntansi aset. studi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aktor keuangan daerah yakni pejabat legislatif maupun eksekutif pemerintah daerah guna memperbaiki, meningkatkan, dan menformulasikan kebijakan tentang akuntansi aset pada pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam mengkaji tentang praktik akuntansi aset pada sektor publik, dapat dijadikan referensi untuk pengembangan studi lebih lanjut.

LANDASAN TEORI

Teori *New Public Management* (NPM)

NPM Berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma *New Public Management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. *Management* memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Pengelolaan aset melalui pengadopsian prinsip NPM ke dalam kebijakan strategis guna mewujudkan pengelolaan aset yang optimal, melalui langkah: restrukturisasi aset, membangun manajemen profesional, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui **sistem informasi manajemen**.

Aset Daerah dan Sistem Pengelolaannya

Istilah aset menjadi konsep hukum setelah didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam

lampiran II pemerintah tersebut, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan dalam penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni: adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (*monitoring*)

Siklus Pengelolaan Aset Daerah

- Perencanaan kebutuhan penganggaran, Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset daerah adalah sesuatu yang sangat penting guna menunjang kelancaran dan kesinambungan penyiapan kebutuhan serta perlengkapan untuk mengemban tugas dari unit/SKPD. Oleh karena itu, perencanaan yang baik, efisien dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah dan barang/aset daerah
- Wewenang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran., Suatu SKPD bisa memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT Daerah). Kepala UPT Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya. Rencana ini disampaikan kepada kepala SKPD. Sebetulnya perencanaan barang milik daerah terdiri dari 2 hal, yaitu perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah.
- Hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Melakukan Perencanaan dan Penganggaran Barang Milik Daerah, Perencanaan kebutuhan barang sebaiknya : a) untuk mengisi kebutuhan barang sesuai beSARAN organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi. b) untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c) didasarkan pada peruntukan standar perorangan. Oleh karena itu, setiap kali terjadi mutasi atau penambahan jumlah personil, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan barang, d) tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan tetap dijaga agar efisien dan efektif, e) memperhatikan faktor teknologi.

Akuntabilitas dan Transparansi Aset Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dipandang sebagai kapasitas individu atau kelompok dalam kesediaannya untuk membuat laporan, memberikan penjelasan atau alasan berkaitan dengan apa yang telah dilakukan (Munro, 1996) atau dalam istilah proses dipandang sebagai “memberi dan menerima” alasan atas apa yang telah dilakukan (Roberts dan Scapens, 1985). Selanjutnya, untuk bertanggungjawab atas kegiatan individu atau kelompok, maka diperlukan upaya untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan dan alasan normatif yang dapat dibenarkan (Giddens, 1984:30). Dengan demikian, norma yang berlaku dalam akuntabilitas juga dapat didasarkan pada wacana dan narasi (Ezzamel, *et al.*, 2007). studi Stewart (1984) serta Goddard dan Burke (1991) menunjukkan bahwa setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan utama dalam membangun sistem akuntabilitas. Pertimbangan pertama, yaitu proses di mana kelompok kepentingan memiliki akses dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai aktor dalam proses akuntabilitas, hubungan di antara mereka dan dampak dari sistem informasi terhadap para aktor. Hal ini menyiratkan pengakuan aspek politik dan budaya dalam akuntabilitas.

Transparansi pada dasarnya untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

dicapai. Prinsip transparansi tersebut memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Menurut Schiavo-Campo dan Tomasi (1999) dalam Mardiasmo (2006), pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Aset yang maknanya terbentuk melalui interaksi sosial dan mengandung nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan dan pengetahuan bukan nilai ekonomi semata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikemas dalam penelitian kualitatif dan mengangkat fenomena mengenai bagaimana makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah dan bagaimana makna akuntansi aset bagi pengelola keuangan daerah di kabupaten Mamasa.

Pemilihan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan desain penelitian dimulai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup paradigma interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, dimana pada model induksi menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian bahkan bisa saja teori tidak dikenal sama sekali karena data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Data tersebut berupa hasil wawancara dengan pihak eksekutif dan legislatif. Eksekutif terdiri dari Wakil Bupati, Kepala Dinas, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bendahara Barang, Sekretaris Camat dan Lurah. Pihak legislatif terdiri dari Ketua Komisi III dan Anggota Komisi I DPRD kabupaten Mamasa. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung, antara lain PSAP Nomor 07 Tahun 2010 dan laporan keuangan dinas terkait. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan untuk dapat menghasilkan data kualitatif yang mendalam. Peneliti memperoleh informan penelitian melalui cara *key person*. , peneliti menggunakan metode analisis dokumen. Dokumen tersebut didapatkan langsung dari dinas terkait. Dokumen yang paling berkompeten untuk dijadikan data pendukung penelitian adalah *annual report*. Selain *annual report*, dokumen lain juga dapat dijadikan sebagai data, data tersebut antara lain dokumen administratif, surat, memo, agenda, kliping, artikel di media massa serta *archival report*. *Archival report* merupakan catatan dinas tersebut.

Penetapan Informan

Informan adalah aktor yang dianggap memahami informasi yang dibutuhkan baik sebagai pelaku maupun orang lain yang memiliki kapasitas untuk memberikan data. Seorang peneliti ,ketika memulai melakukan penelitian sebaiknya berupaya menemukan *gatekeeper*, yaitu siapapun orang yang pertama dapat menerimanya di lokasi penelitian dan sebagai pemberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan topik penelitiannya (Bungin, 2007: 76). Pada sisi lain, penentuan informan harus memenuhi kriteria kualitas, bukan sekedar keterwakilan populasi seperti yang disampaikan oleh Strauss dan Corbin (1997). Penentuan informan awal ini dari seseorang yang dianggap lebih banyak mengetahui

permasalahan penelitian yang disebut informan kunci, dalam studi ini adalah Wakil Bupati Mamasa.

Metode Analisis Data

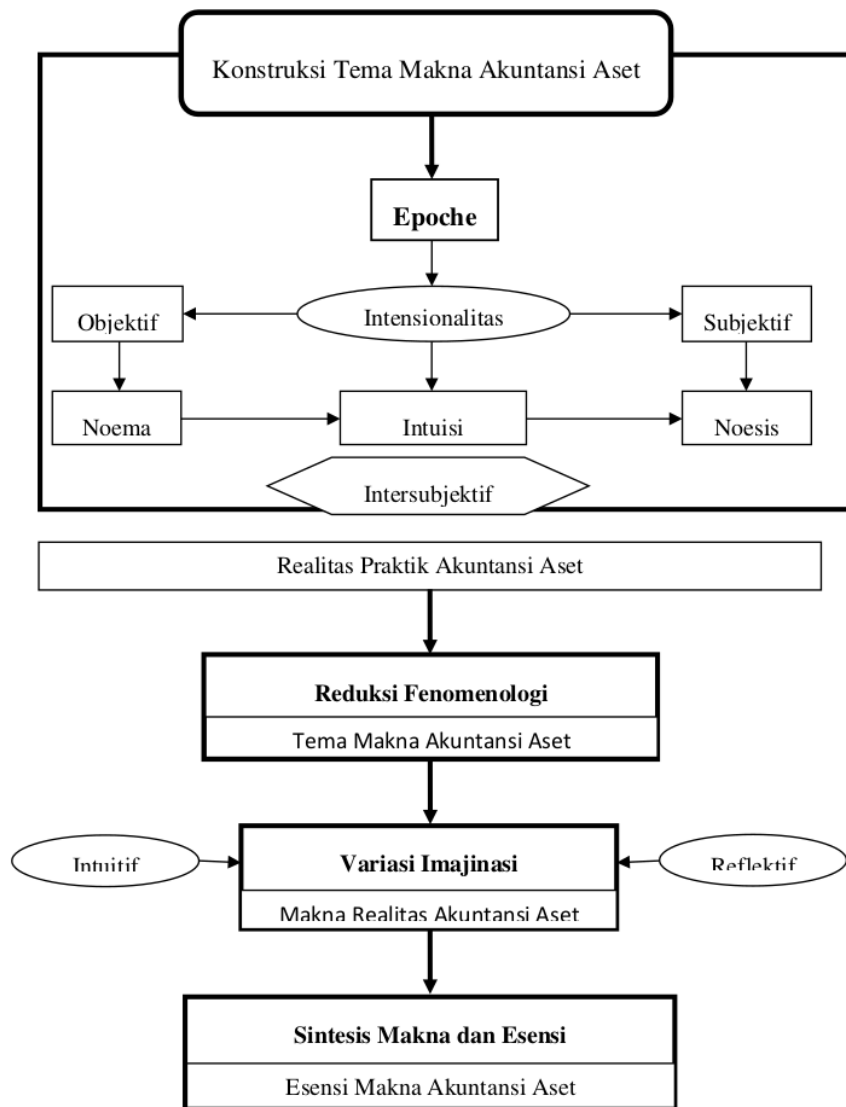
- a. Membaca dan membaca kembali (*Reading and Re-reading*)
- b. Pemberitahuan awal (*Initial Noting*)
- c. Mengembangkan kemunculan tema-tema (*Developing Emergent Themes*)
- d. Mencari koneksi sebuah tema yang muncul secara tiba-tiba (*Searching for connection a cross emergent themes*)
- e. Memindahkan kasus selanjutnya (*Moving the next cases*)
- f. Mencari pola di seluruh kasus (*Looking for patterns across cases*).

Alur Pikir Penelitian

Mengacu pada tahapan analisis yang dikembangkan Sander (1982), secara garis besar rerangka penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan. Tahap pertama yang dilakukan dalam studi ini adalah pengumpulan data melalui *in-depth interview* dan dilanjutkan dengan membuat deskripsi data. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mendeskripsikan data dilakukan dengan cara membuat transkripsi untuk mendeskripsikan rekaman hasil wawancara, tulisan-tulisan, dan data lain yang dianggap relevan sebagaimana yang diperoleh dari informan. Narasi yang dihasilkan dalam transkripsi ini ditujukan untuk menggambarkan kualitas pengalaman dan kesadaran yang menjadikan manusia (informan) memiliki identitas dan pandangan yang unik.

Pada tahapan pertama, peneliti melakukan *epoche* dengan cara menunda semua presuposisi terhadap fenomena. Setiap narasi dalam transkripsi yang dihasilkan dalam tahapan ini kemudian diletakkan dalam sebuah horison pengalaman yang dianggap tidak pernah lengkap, memiliki makna multi dimensi dan penuh misteri, proses ini dinamakan *horizontalizing*. Pada tahap ini diperoleh realitas praktik akuntansi aset pemerintah daerah.

Tahap kedua adalah reduksi fenomenologi. Menurut Spiegelberg (1982), seperti yang dikutip Cohen (1994: 139), reduksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu reduksi transendental dan reduksi eiditis. Reduksi fenomenologi yaitu melakukan analisis fenomenologi berdasarkan pemetaan hasil *in-depth interview* untuk mengidentifikasi tema-tema penting. Berger dan Luckman (1990), sebagaimana yang dikutip Basrowi (2008: 228), menyatakan bahwa reduksi fenomenologi merupakan proses menyeleksi kenyataan-kenyataan yang penting-penting saja. Selanjutnya, menurut Sanders (1982) pada tahapan ini secara intuitif dan refleksi subjektif, tema-tema penting diidentifikasi dan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya atau sentralitas tema yang terdapat di dalam atau di antara narasi-narasi data penelitian dan bukan atas dasar frekuensi kemunculannya. Selanjutnya, hal-hal yang sifatnya tidak penting (*nonesensial*) dikesampingkan supaya diperoleh suatu situasi yang murni, yang menggambarkan penghayatan atau aliran pengalaman hidup informan terhadap fenomena yang diteliti. Pada tahap ini diperoleh tema-tema penting atas makna akuntansi aset pemerintah daerah.



Tahap ketiga adalah variasi imajinasi untuk mengembangkan korelat antara *noema* dengan *noesis*. Langkah ini dilakukan untuk menemukan *noetic/noumatic correlates*. *Noetic* menggambarkan persepsi subjektif individu (peneliti) secara intuitif dan reflektif terhadap tema-tema penting yang dipilih dalam tahapan reduksi fenomenologi. Interpretasi korelat ini merupakan hal yang mendasar untuk bisa mencari sintesis makna fenomena atau pengalaman setiap kelompok individu, dalam hal ini pengelola keuangan daerah. Pada tahap ini diperoleh makna realitas akuntansi aset pemerintah daerah.

Tahap keempat adalah sintesis makna dan esensi yaitu proses menemukan esensi *noetic/noumatic correlates*. Pada tahapan ini secara intuitif dan refleksi subjektif seluruh

sintesis makna yang tercecer dirangkum menjadi satu untuk mengungkap esensi atau makna keseluruhan. Tugas peneliti pada tahapan ini adalah merangkai semua *noetic/noumatic correlates* dalam sebuah bingkai (*framing*) sehingga menggambarkan esensi keseluruhan makna fenomena. Ibarat sebuah karya seni, *framing* adalah pekerjaan membuat sebuah mozaik yang bahan dasarnya warna-warni makna yang diberikan informan terhadap fenomena yang disadarinya. Pada tahap akhir ini diperoleh esensi makna akuntansi aset pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Aset Darah: Barang Modal, Alat Politik Dan Sumber Penyalagunaan Anggaran

Perbedaan karakteristik organisasi pemerintah sebagai lembaga publik dengan organisasi swasta berakibat terhadap cara pandang pemerintah dalam memaknai aset-asetnya. Pemaknaan terhadap aset lebih dipengaruhi oleh cara pandang para aktor pengelola keuangan daerah dalam memahami aset. Aset dimaknai berdasarkan sumber pendanaan (anggaran), kewenangan pengelolaan, serta fungsi dan kegunaan dari setiap aset yang ada pada pemerintah daerah. Berdasarkan perspektif sumber pendanaan (anggaran), aset merupakan barang modal (*capital assets*) dan belanja modal merupakan sumber pendanaan aset dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks ini, aset yang diperoleh akan dicatat dan dilaporkan sebagai aset dalam neraca sebesar nilai belanja modal yang tercantum dalam APBD.

Aset dipahami sebagai barang modal yang diperoleh melalui belanja modal dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, karena belanja modal itu sendiri merupakan suatu jenis pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, aset lebih dipahami sebagai aset tetap baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Barang yang diperoleh selain dari belanja modal seperti belanja barang dan jasa tidak dikategorikan sebagai aset dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dasar pemahaman ini telah memengaruhi lingkup/cakupan makna aset yang dipahami, di mana aset diidentikkan dengan barang modal yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Dengan demikian makna aset dalam perspektif ini hanya mencakup aset fisik atau aset nonkeuangan, padahal selain aset tersebut juga ada kelompok aset lain. Kelompok aset yang lain tersebut yaitu aset finansial yang meliputi kas, piutang, dan investasi.

Aset dapat digunakan sebagai alat politik seperti penggunaan kendaraan dinas, gedung untuk kegiatan kampanye dan perbaikan jalan raya karena dekat dengan pemilihan. Aset juga merupakan sumber penyelewengan anggaran seperti *mark up* anggaran, *mark down* dan laporan fiktif. Suatu barang dianggap sebagai aset manakala dananya bersumber dari belanja modal. Belanja modal menjadi dasar mendefinisikan dan memperlakukan barang yang diperoleh sebagai aset dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah aset dimaknai sebagai BMD yang merupakan barang modal yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, BMD hanya merupakan bagian dari seluruh aset yang dimiliki dan harus dilaporkan oleh pemerintah daerah.

Pemahaman seperti tersebut di atas dapat dimaklumi karena pada beberapa tahun terakhir salah satu permasalahan besar dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah belum optimalnya sistem pengelolaan dan pelaporan aset tetap. Upaya perbaikan pengelolaan aset tetap sebagai wujud kepatuhan pada peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah banyak memengaruhi pemahaman pengelola keuangan daerah tentang makna aset dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam konteks ini, aset dimaknai sebagai Barang Milik Daerah yang hanya mencakup aset

non keuangan. Padahal, dalam konteks akuntansi keuangan daerah, aset memiliki cakupan yang lebih luas yakni meliputi aset keuangan dan aset nonkeuangan atau aset fisik.

Dengan demikian, pengelolaan aset tetap atau Barang Milik Daerah lebih banyak mewarnai pemahaman pengelola keuangan daerah terhadap makna aset. Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di dalam pengelolaan dan pelaporan aset yang masih terbatas turut memengaruhi lingkup pemahaman mereka terhadap aset.

Aset Daerah: Fasilitas Kekuasaan Dan Modal Simbolik/Prestise

Berdasarkan kewenangan pengelolaan, aset pemerintah daerah dimaknai sebagai kekuasaan baik untuk kepentingan pribadi maupun yang melekat pada jabatan. Aset sebagai kekuasaan bermakna bahwa pengelola keuangan daerah memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan aset dan terdapat aset yang dimanfaatkan oleh pejabat sebagai fasilitas dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai pemegang kekuasaan.

Pengelola keuangan daerah memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan pemanfaatan dari setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan setiap aset sedapat mungkin memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kekuasaan pengelola keuangan daerah dalam pengelolaan aset bukan sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terkendali. DPRD selaku mitra pemerintah senantiasa melakukan fungsi pengawasan mulai penganggaran aset, pengadaan aset, sampai dengan penggunaan aset.

Pengelola keuangan daerah yang menempati suatu jabatan tertentu (pejabat) memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan aset sebagai fasilitas yang disediakan untuk jabatan tersebut. Aset dimaknai sebagai fasilitas yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Sehingga pemanfaatan aset tersebut lebih kepada kegiatan pejabat yang bersangkutan. Namun demikian, pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas keamanan dari aset tersebut. Dengan cara demikian kendaraan dinas lebih terkendali pemanfaatannya dan keamanannya lebih dapat terjamin. Kendaraan dinas lebih terpelihara sehingga dapat memperpanjang umur ekonomisnya. Hal ini juga berdampak pada biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang relatif dapat terkendali.

Selain sebagai kekuasaan aset juga merupakan simbol simbolik/prestise bagi pejabat yang menggunakannya. Fasilitas dianggap sebagai penunjang atas hasil prestasi dirinya yang dipercaya menduduki jabatan tersebut. Baginya, bukan kualitas barangnya yang utama, tetapi penghargaan atas nilai perjuangan untuk sampai pada jabatannya.

Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset pemerintah daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelola keuangan daerah sebagai subyek pengelolaan aset, dapat menggunakan kewenangan (kekuasaan) yang dimiliki dalam menentukan pengelolaan aset pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan aset sangat tergantung pada komitmen pengelola keuangan daerah dalam menggunakan kewenangan (kekuasaan) yang dimilikinya. Untuk itu, perlu adanya sistem pengelolaan yang baik terhadap aset pemerintah daerah, karena pengelolaan aset pemerintah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik akan mendukung terciptanya pengelolaan aset yang efisien dan efektif dalam kerangka pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan tertib dan optimal maka seluruh tahapan pengelolaan aset perlu dilakukan dalam satu kesatuan sistem. Perencanaan yang tepat bertujuan agar penggunaan anggaran dalam pengelolaan aset dilakukan secara efisien dan efektif. Pengelolaan aset secara efisien dan efektif bertujuan agar pengelolaan aset

pemerintah daerah dilakukan secara baik dan benar yaitu profesional, transparan dan akuntabel sehingga aset tersebut memberikan manfaat yang optimal baik itu untuk jalannya roda pemerintahan maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

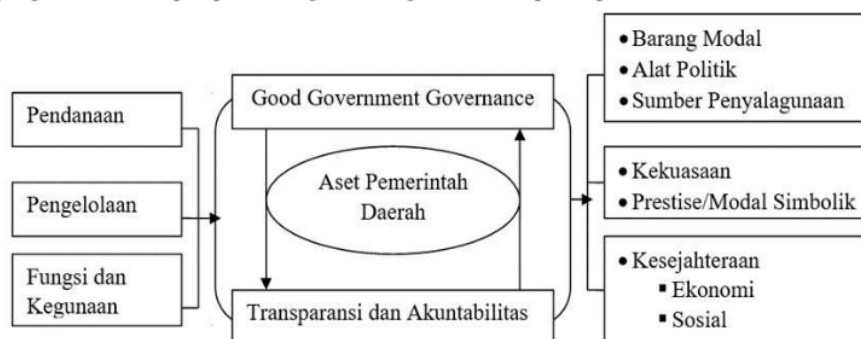
Aset pemerintah daerah pada umumnya bersumber dari dana APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Dana yang disediakan untuk perolehan aset terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD dengan akun belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Harga perolehan aset meliputi harga beli aset itu sendiri termasuk pengeluaran yang berkontribusi langsung terhadap perolehan aset. Selain bersumber dari belanja modal, aset pemerintah daerah dapat diperoleh melalui sumber perolehan lain yang sah.

Nilai Sosial Dan Ekonomi: Makna Aset Dalam Perspektif Fungsi Dan Manfaat

Berdasarkan fungsi dan kegunaannya, aset pemerintah daerah dimaknai sebagai kesejahteraan, dan kesejahteraan masyarakat (kolektif) diatas individu dan organisasi. Aset Kesejahteraan terdiri dari tiga macam. *Pertama*, aset untuk kesejahteraan individu yaitu aset yang diperuntukkan sebagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas pejabat sekaligus sebagai kesejahteraan bagi pejabat yang bersangkutan. *Kedua*, aset untuk kesejahteraan organisasi yaitu aset yang diperuntukkan sebagai fasilitas operasional kantor pemerintah daerah sekaligus sebagai kesejahteraan seluruh staf (pegawai) pemerintah daerah. *Ketiga*, Aset untuk kesejahteraan masyarakat (kolektif) yaitu aset yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari dua macam yaitu barang merit dan barang publik murni. Penggunaan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif lebih diutamakan daripada aset untuk kesejahteraan individu maupun organisasi. Karenanya, penggunaan aset pemerintah daerah lebih dominan pada aset-aset yang berupa fasilitas layanan publik yang mendukung pelayanan sosial atau aset yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian maka makna aset merupakan kesejahteraan baik nilai sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

Konstruksi Model Pemaknaan Aset Daerah

Aset dapat dipandang dari berbagai perspektif yang melingkupi lingkungan organisasi pemerintah daerah seperti perspektif sumber pendanaan, perspektif kewenangan pengelolaan, serta perspektif fungsi dan kegunaan setiap aset pemerintah daerah.



Dalam perspektif sumber pendanaan, aset merupakan barang modal (*capital assets*) yang digunakan dalam operasional pemerintah daerah. *Capital assets* bersumber dari belanja modal dalam APBD dengan karakteristik aset fisik seperti aset tetap. Aset dalam perspektif pendanaan bukan hanya masalah teknis tetapi juga merupakan alat politik

dan sumber penyalagunaan kekuasaan. Selanjutnya, dalam perspektif kewenangan pengelolaan, aset merupakan kekuasaan bagi aktor pengelola keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah memiliki kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan penggunaan suatu aset pemerintah daerah, dan terdapat beberapa jenis aset sebagai fasilitas kekuasaan yang dipergunakan pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu aset dianggap sebagai modal simbolik/prestise bagi pejabat atau yang diberikan kewenangan untuk menggunakan fasilitas karena jabatannya.

Sementara dalam perspektif fungsi dan kegunaan, aset merupakan kesejahteraan baik kesejahteraan individu, kesejahteraan organisasi, maupun kesejahteraan masyarakat (kolektif). Aset kesejahteraan individu merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan sebagai fasilitas seorang pejabat tertentu. Aset kesejahteraan organisasi merupakan aset yang dipergunakan oleh seluruh staf dalam operasional kantor. Kemudian, aset kesejahteraan masyarakat (kolektif) merupakan aset operasional pemerintah daerah yang dipergunakan oleh staf dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat atau aset yang dipergunakan secara langsung oleh masyarakat. Keutamaan aset untuk kesejahteraan masyarakat (kolektif) baik secara ekonomi maupun social.

Seluruh aset pemerintah daerah diupayakan untuk dikelola secara efektif dan efisien dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Selanjutnya, aset-aset tersebut dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaporan (akuntansi) aset pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset dalam rangka menuju pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel. Transparan dalam arti bahwa data aset pemerintah daerah dapat diandalkan dan informasi tentang aset lebih terbuka untuk umum. Pelaporan aset dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat akan pengelolaan aset pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aset pemerintah daerah merupakan barang modal (*capital assets*) yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dan masyarakat umum yang mesti dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN AGENDA PENELITIAN KE DEPAN

Simpulan

Pemaknaan terhadap aset lebih dipengaruhi oleh cara pandang para aktor pengelola keuangan daerah dalam memahami aset. Aset dimaknai berdasarkan sumber pendanaan, kewenangan pengelolaan, serta fungsi dan kegunaan dari setiap aset yang ada pada pemerintah daerah.

- a. Pemaknaan aset berdasarkan perspektif sumber pendanaan:
 - a. Aset pemerintah daerah dipahami sebagai barang modal (*capital assets*) yang digunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah daerah. Aset dipahami sebagai barang modal yang diperoleh melalui belanja modal yaitu dianggarkan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset lebih dipahami sebagai barang modal (*capital assets*) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - b. Aset merupakan SARANA politik bagi aparatur pemerintah daerah yaitu berkaitan dengan penyalagunaan aset untuk kepentingan politik khususnya dalam mendekati pilkada.
 - c. Aset menjadi sumber penyalagunaan anggaran oleh aparatur pemerintah daerah baik dalam perencanaan dan pengadaan.
- b. Pemaknaan aset berdasarkan perspektif kewenangan pengelolaan:
 - a. Aset pemerintah daerah dipahami sebagai kekuasaan aktor pengelola keuangan daerah. Aset sebagai kekuasaan bermakna bahwa pengelola keuangan daerah

- memiliki kekuasaan terhadap pengelolaan aset baik secara pribadi maupun yang melekat pada jabatan.
- b. Aset merupakan modal simbolik/prestise bagi pejabat itu sendiri.
 - c. Pemaknaan aset berdasarkan perspektif fungsi dan kegunaan. Aset pemerintah daerah dipahami sebagai kesejahteraan, dan keutamaan aset untuk kesejahteraan masyarakat (kolektif) melebihi aset untuk kesejahteraan individu dan kesejahteraan organisasi. Aset untuk kesejahteraan (*welfare assets*) merupakan aset/barang modal (*capital assets*) yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat baik yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan maupun yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Aset tersebut mengandung nilai ekonomi dan sosial di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan walaupun peneliti telah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dalam proses, paradigma dan metode, serta analisis data dalam penelitian ini. Beberapa hal yang peneliti anggap menjadi keterbatasan studi ini adalah: *Pertama*, proses pengambilan data dalam studi ini dilakukan hanya beberapa bulan, di mana kurun waktu ini dianggap masih relatif singkat untuk sebuah penelitian dengan fenomenologi transendental sehingga kedalaman data yang dikumpulkan belum optimal. *Kedua*, informan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan aktor pengelola keuangan daerah, sementara informan yang bersumber dari masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah daerah tidak dilibatkan dalam penelitian ini, sehingga sangat memungkinkan ada data yang tidak diperoleh secara mendalam dalam penelitian ini.

Agenda Penelitian ke Depan

Studi ini mengkaji makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah dan makna akuntansi aset bagi pemerintah daerah dengan menggunakan paradigma interpretif yang dalam hal ini menggunakan fenomenologi transendental. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian dengan lebih mendalam dengan melibatkan informan yang lebih luas termasuk masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan paradigma lain seperti paradigma kritis untuk dapat melakukan kritisi terhadap konsep aset berdasarkan makna aset dalam perspektif aktor pengelola keuangan daerah. Selain itu, dapat menggunakan paradigma non-positivistik yang lain untuk dapat merekonstruksi makna akuntansi aset pada sektor publik khususnya pada pemerintah daerah sehingga dapat memperkaya konsep akuntansi aset pada sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, B., Mussari, R. dan Jones, R. 2011. The Diversity of Accrual Policies in Local Government Financial Reporting: An Examination of Infrastructure, Art and Heritage Assets in Germany, Italy and The UK. *Financial Accountability & Management*, 27(2), pp. 106-133.
- Anthony, R.N. 2001. The Fatal Defect in the Federal Accounting System. *Public Budgeting and Finance*, 20(4), pp. 1-10.
- Barret, P. 2004. *Financial Management in The Public Sector – How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability*. The Proceeding of Challenge of Change: Driving Governance and Accountability, Singapore: CPA Forum.
- Belkaoui, A.R. 2006. *Accounting Theory*. Five Edition. Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto dan Rinawati Dermauli. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, A.R. 1992. *Accounting Theory*. Chicago: Academic Press Limited.

- BPK RI. 2016. *Iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2006. dapat di akses melalui web BPK, PDF.*
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial.* Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Bungin, M.Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.* Jakarta:Prenada Media Group.Jakarta. hlm 69.
- Cheng, R.H. dan Harris, J.E. 2000. External Reporting of Capital Assets: A Sources and Uses Model. Dalam Caperchione, E. dan Mussari, R. (Eds), *Comparative Issues in Local Government Accounting, Kluwer Academic Publishers*, London, pp. 191-209.
- Christiaens, J. 2000. Municipal Accounting Reform in Flanders: An Empirical Study of The Outcomes. Dalam Caperchione, E. dan Mussari, R. (Eds), *Comparative Issues in Local Government Accounting, Kluwer Academic Publishers*, Dordrecht, pp. 103-124.
- Christiaens, J. dan Rommel, J. 2008. Accruals Accounting Reforms: Only for Businesslike (Parts of) Governments. *Financial Accountability and Management*, 24(1), pp. 59-75.
- Christopher and Rothstein, Henry and Spackman, Michael and Rees, Judith and Baldwin, Robert (1999) Explaining risk regulation regimes: exploring the 'minimal feasible response' hypothesis *Health, Risk and Society*, 1 (2). 151-166. ISSN 1369-8575
- Chua, W.F. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, LXI(4), pp. 601-631.
- Djamhuri, A. dan Mahmudi. 2006. New Public Management, Accounting Reform and Institutional Perspective of Public Sector Accounting in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3, pp. 301-321.
- Fiol, C.M. 1989. A Semiotic Analysis of Corporate Language: Organizational Boundaries and Joint Venturing. *Administrative Science Quarterly*, 34, pp. 277-303.
- Francis, J.R. 1990. After Virtue? Accounting is a Moral and Discursive Practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 3(3), pp. 5-17.
- Hines, R. D. 1989. The Sociopolitical Paradigm in Financial Accounting Research. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 2(1), pp. 52-76.
- Hopwood, A.G. 1987. The Archeology of Accounting Systems. *Accounting, Organizations and Society*, 12(3), pp. 207-234.
- <https://ituinisana.wordpress.com/2012/05/22/akuntansi-dan-kapitalisme/>
- Ian Mackintosh, Chairman.2003. *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities*, Issued By The International Federation Of Accountants. New York 10017 United States of America
- Jolicoeur, P.W. dan Barrett, J.T. 2004. Coming of Age: Strategic Asset Management in the Municipal Sector. *Journal of Facilities Management*, 3(1), pp. 41-52.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu SARANA Good Governance.* *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Miller, P. dan Napier, C. 1993. Genealogies of Calculation. *Accounting, Organizations and Society*, 18(7/8), pp. 631-647.
- Monsen, N. dan Nasi, S. 1998. The Contingency Model of Governmental Accounting Innovations: A Discussion. *European Accounting Review*, 7(2), pp. 275-288.

- Morgan, G. 1988. Accounting as Reality Construction: Toward A New Epistemology for Accounting Practice. *Accounting, Organizations and Society*, 13(5), pp. 477-485.
- Muda W, Sumini. 2010. Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah, Puduklat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nasution, A. 2008. *Reforming the State and local government financial management (Perbaikan keuangan negara dan daerah)*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, SARANA, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah.
- Pramuka, B. A. dan Goedono (Editor). 1990. Prinsip Akuntansi Berwawasan Lingkungan (Suatu Evaluasi Terhadap PAI). Dalam *Teori Akuntansi: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Riduwan, A. 2009. *Tafsir Sosial Laba Akuntansi: Kajian Semiotika Dekonstruktif Berbasis Filsafat Jacques Derrida*. Disertasi. Malang: Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Roberts, J., dan Scapens, R. 1985. Accounting Systems and Systems of Accountability: Understanding Accounting Practices in Their Organizational Context. *Accounting, Organisations and Society*, pp. 443-456.
- Siegel dan Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. Cincinnati: South-Western Publishing Co.
- Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data, Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: BPF.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Tricker, R. I. 1978. *Research in Accounting*. Arthur Young Lecture No. 1. University of Glasgow Press.
- Tores, L. 2004. Accounting and Accountability: Recent Developments in Governmental Financial Information Systems. *Public Administration and Development*, 24, pp. 447-456.
- Triuwono, I. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Lkis.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2008. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Tentang Pemerintahan Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Fokusmedia. Bandung. 2006.
- Watts, R.L. dan Zimmerman, J.L. 1986. *Positive Accounting Theory*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Pemaknaan Aset Pemerintah Daerah (Sebuah Studi Fenomenologi),

ORIGINALITY REPORT

27 %
SIMILARITY INDEX

27 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

10 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

15%
★ repository.ub.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%